

Analysis Of Regional Income Level In Lombok Island In 2019-2020

Analisis Tingkat Ketimpangan Pendapatan Regional Di Pulau Lombok Tahun 2019-2020

Muhamad Sayuti^{1*} , Ahmad Suhendri²

Universitas Islam Al-Azhar^{1,2}

sayuthi.say@gmail.com¹ , hendryfe@yahoo.com²

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This research is entitled "Analysis of Regional Income Inequality in Lombok Island in 2019-2020". In this study, we want to see how the level of income between regions on the island of Lombok from 2019-2020. The type of this research is quantitative research with a descriptive approach, while the method or analytical tool used in this research is the Williamson index. The results of this study are that after calculations with the Williamson index know what is happening in each area on the island of Lombok is the medium category, this can be seen from the value of the Williamson index in 2019 of 0.56 and in 2020 of 0,51. The causes that occur on the island of Lombok are (a) differences in the quality of human resources (b) differences in the number of unemployed (c) differences in health levels, (d) differences in infrastructure quality, (e) differences in the amount of investment (f) differences in regional gross domestic income.

Keywords : GRDP, Economic Sector, Shift Share Analysis, LQ . Analysis

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Tingkat Ketimpangan Pendapatan Regional di Pulau Lombok Tahun 2019-2020 Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana tingkat ketimpangan pendapatan antarwilayah yang ada di Pulau Lombok dari tahun 2019-2020. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan metode atau alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks wiliamson. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa setelah dilakukan perhitungan dengan indeks wiliamson diketahui tingkat ketimpangan yang terjadi di masing-masing daerah yang ada di Pulau Lombok adalah kategori ketimpangan sedang, hal ini dilihat dari nilai indek wiliamson pada tahun 2019 yakni sebesar 0,56 dan pada tahun 2020 sebesar 0,51. Adapun penyebab ketimpangan yang terjadi di pulau lombok adalah (a) perbedaan kualitas sumberdaya manusia (b) perbedaan jumlah pengguran (c) perbedaan taraf kesehatan, (d) perbedaaan kualitas infrastruktur, (e) perbedaan jumlah investasi (f) perbedaan pendapatan domestik regional bruto.

Kata Kunci : PDRB, Sektor Ekonomi, Analisis Shift Share, Analisis LQ

1. Pendahuluan

Menurut (Sjafrizal, 2008), motivasi suatu daerah memekarkan diri adalah untuk meningkatkan jangkauan pelayanan publik, terutama untuk daerah dengan luas cukup besar. Akan tetapi, seringkali motivasi pemekaran daerah juga dipicu oleh aspek keuangan daerah dan politis. Salah satu faktor pendorong mengapa pemerintah lokal melihat kesempatan besar dengan adanya pemekaran daerah adalah secara materil, dengan adanya pembentukan kabupaten dan provinsi baru maka daerah-daerah tersebut akan menerima suntikan dana pembangunan yang lebih besar dari pemerintah pusat. Dalam aspek pengembangan wilayah, pelaksanaan pemekaran daerah dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi daerah induk dan daerah otonom baru hasil pemekaran daerah. Hal ini dikarekan oleh adanya perbedaan sumber daya yang digunakan dalam proses pembangunan sebelum dan setelah terjadinya pemekaran daerah. Adakalanya pemekaran daerah menyebabkan kegiatan perekonomian daerah induk menurun drastis karena sebagian potensi daerahnya berada di daerah otonom baru.

Pulau Lombok merupakan salah satu pulau yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pulau Lombok terdiri dari lima Kabupaten/ Kota, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara. Dari kelima Kabupaten/ Kota yang ada di Pulau Lombok ini tentunya memiliki perbedaan potensi secara ekonomi, dan inilah yang akan menyebabkan terjadi perbedaan pendapatan regional di daerah tersebut. Perbedaan pendapatan regional ini juga akan berdampak terhadap perbedaan pendapatan perkapita di setiap Kabupaten/kota yang ada di Pulau Lombok. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Tingkat Ketimpangan Pendapatan Regional Di Pulau Lombok Tahun 2019-2020.

3. Metode Penelitian

Jenis and Data Source

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen-dokumen perusahaan atau organisasi, surat kabar dan majalah, ataupun publikasi lainnya (Marzuki, 2008).

Periode data yang digunakan adalah data tahun 2019-2020 yang berupa data

1. Data mengenai pendapatan perkapita masing-masing Kabupaten/ Kota yang ada di Pulau Lombok
2. Data mengenai Jumlah Penduduk yang ada di masing-masing Kabupaten/ Kota yang ada di Pulau Lombok

Analysis Method

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisa mengenai ketimpangan antar Kabupaten/ Kota yang ada di Pulau Lombok. Salah satu ukuran ketimpangan pendapatan antar wilayah yang mudah dalam penghitungan adalah indeks Williamson karena indeks ini sebenarnya modifikasi dari formula varians dengan penimbang tertentu (Kuncoro, 2004).

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil Analisis Indeks Wiliamson

Setelah melakukan analisis ketimpangan pendaptan dengan menggunakan metode indeks wiliamson maka didapatkan hasil perhitungan analisi indeks wiliamson pada tahun 2019 yang terjadi di pulau Lombok adalah sebesar 0,56. Berdasarkan ketentuan nilai indeks wilamson bahwa pabila nilai indek ketimpangan sebesar 0,01-040 maka termasuk ketimpangan rendah, nilai 0,40- 0,60 kategori ketimpangan sedang, sedangkan diatas nilai 0,60 berarti kategori ketimpangan tingkat tinggi.

Berdasarkan hasil perhitungan indeks wiliamson pada tahun 2019 bahwa nilai indeks wiliamson atau angka ketimpangan pendapatan yang ada di Pulau Lombok sebesar 0,56 (pada lampiran) hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi antara Kabupaten/ Kota di Pulau Lombok tahun 2019 termasuk kategori sedang, hal ini merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah dalam upaya melakukan pemerataan disetiap daerah, supaya setiap daerah tidak memunculkan kecemburuan terhadap daerah yang lain yang lebih maju.

Sedangkan pada tahun 2020 berdasarkan perhitungan dengan metode indeks wilamson angka ketimpangan di Pulau Lombok sebesar 0,51 (pada lampiran). Kaitannya dengan angka ketimpangan pada tahun 2020 di Pulau Lombok bahwa angka ketimpangan tersebut mengalami penurunan tetapi masih dalam kategori ketimpangan tingkat sedaang, artinya angka ketimpangan tersebut harus diminimalisir guna menghindari maslah kecemburuan sosial bagi masing-masing daerah yang ada di Pulau Lombok.

Tingkat ketimpangan antara daerah yang diukur menggunakan Indeks Williamson dimana semakin besar angka indeks tersebut berarti ketimpangan antar daerah semakin tinggi. Ketimpangan regional di Pulau Lombok diukur menggunakan perhitungan Indeks Williamson menunjukkan angka yang relatif besar pada tahun 2019-2020 yakni berada pada ketimpangan tingkat sedang karena nilai atau angka indeks Williamson sebesar 0,56 dan 0,51. Artinya dalam satu tahun terakhir angka ketimpangan yang terjadi di Pulau Lombok memang mengalami penurunan, tetapi penurunannya tidak signifikan, untuk itu masing-masing pemerintah daerah yang ada di Pulau Lombok harus terus meningkatkan eksistensi sektor ekonominya masing-masing dalam upaya meminimalisir tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah di Pulau Lombok

Penyebab Ketimpangan

Adapun penyebab ketimpangan pendapatan regional adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan kualitas sumberdaya manusia

Sumberdaya manusia sangat penting bagi suatu wilayah. Namun tanpa kualitas yang memadai sumberdaya manusia ini kurang dapat berperan optimal dalam kemajuan wilayah. Perbedaan kualitas sumberdaya manusia yang dimaksud adalah tingkat pendidikan masyarakat, serta tingkat pendidikan pekerja. Tingkat pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dan nilai jual masyarakat itu sendiri. Pekerja dengan tingkat pendidikan rendah dan kemampuan rendah akan sulit mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang baik. Dibeberapa wilayah yang ada di Pulau Lombok seperti, Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Utara tentunya juga memiliki perbedaan dari segi kualitas sumberdaya manusia, sehingga hal ini yang menyebabkan terjadinya masalah ketimpangan yang terjadi di masing-masing wilayah yang ada di Pulau Lombok. Berkaitan dengan perbedaan kualitas sumberdaya manusia dari segi pendidikan. Faktor pendidikan sangat penting sekali dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia disuatu daerah, untuk itu untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan ini maka ketersediaan fasilitas pendidikan seperti perguruan tinggi perlu diadakan dimasing-masing daerah, karena untuk meminimalisir tingkat kesenjangan dari segi pendidikan, karena faktor pendidikan ini sangat penting sekali dan itu merupakan investasi dimasa depan dalam upaya pembangunan ekonomi masing-masing daerah guna meminimalisir ketimpangan yang terjadi disuatu daerah.

2. Perbedaan Angka Pengguran

Angka pengangguran atau penduduk usia produktif yang tidak bekerja dan tidak sedang melanjutkan pendidikannya tentu menjadi beban bagi pemerintah. Perbedaan kemampuan penyerapan tenaga kerja suatu wilayah dapat menjadi salah satu penyebab tingginya angka pengangguran, selain itu rendahnya kemampuan masyarakat juga membuat masyarakat tersebut kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan.

Pengguran merupakan suatu beban bagi pemerintah daerah, karena dengan adanya pengguran ini tentunya akan menyebabkan terjadinya perbedaan pendapatan masing-masing daerah yang ada di Pulau Lombok ini, karena masing-masing daerah memiliki perbedaan daya serap dalam menyerap masyarakat usia produktif untuk mendapatkan pekerjaan, ketika seseorang tidak bekerja, maka dia tidak akan punya pendapatan, sehingga banyaknya pengguran menyebabkan berkurangnya pendapatan regional suatu wilayah, untuk itu untuk meminimalisir ketimpangan yang terjadi disuatu daerah maka pemerintah masing-masing daerah yang ada di Pulau Lombok harus senantiasa mengentaskan masalah pengguran ini.

Kaitannya dengan masalah pengguran ini, maka salah satu jalan yang bisa ditempuh oleh pemerintah daerah dalam mengatasi masalah pengguran ini dengan cara membuka

lapangan kerja baru, yakni dengan cara membuka peluang investasi bagi semua pihak, baik pihak swasta, masyarakat maupun pemerintah, karena dengan adanya investasi ini maka akan membuka lapangan kerja baru, sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran di masing-masing daerah, dan masalah ketimpangan atau disparitas ini dapat diatasi atau dapat diminimalisir.

3. Perbedaan/ Taraf Kesehatan Masyarakat di Masing-masing daerah

Kesehatan merupakan salah satu inventasi, dengan kesehatan yang baik, produktifitas kerja dapat meningkat. Masyarakat dapat melakukan usahausaha untuk menyejahterakan kehidupannya. Perbedaan taraf/ tingkat kesehatan . kaitannya dengan perbedaan taraf kesehatan ini maka salah satu faktor pendukung penting dari taraf kesehatan ini adalah ketersediaan rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang ada di masing-masing daerah di Pulau Lombok. Terkait dengan fasilitas kesehatan tersebut, berikut diberikan gambaran mengenai jumlah rumah sakit yang ada di masing-masing daerah yang ada di Pulau Lombok sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Rumah sakit yang ada di masing-masing daerah di Pulau Lombok tahun 2019-2020.

Kabupaten/ Kota	Tahun	
	2019	2020
Kota Mataram	12	12
Lombok Barat	2	2
Lombok Tengah	3	3
Lombok Timur	3	4
Lombok Utara	1	1

Sumber : BPS Provinsi NTB 2021

Dari data di atas terlihat perbedaan jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Pulau Lombok, Kota Mataram memiliki jumlah fasilitas kesehatan yang paling banyak yang berupa keberadaan rumah sakit, dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota yang lain yang ada di Pulau Lombok, sehingga dengan perbedaan ini tentunya akan menyebabkan terjadinya kesenjangan antar daerah yang terjadi di Pulau Lombok ini berada pada kategori sedang yakni dengan nilai indeks wiliamson sebesar 0,50 keatas. Untuk itu untuk menaggulangi halini maka pemerintah daerah khususnya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus menambah jumlah fasilitas kesehatan di masing-masing daerah, karena keberadaan fasilitas kesehatan ini akan sangat mempengaruhi dari taraf kesehatan dari masing-masing masyarakat, dan ini akan berdampak pada produktifitas masyarakat, serta produktifitas akan mempengaruhi tingkat pendapatan dari masing-masing masyarakat yang ada di suatu daerah

4. Perbedaan Kualitas Infrastruktur di Masing-masing Daerah

Kualitas infrastruktur yang dimaksud adalah jalan sebagai prasarana transportasi. Jalan sangat penting bagi mobilitas barang dan jasa, migrasi maupun lainnya. Terhambatnya mobilitas akan berdampak pada terhambatnya hubungan antar wilayah. Seperti yang dikatakan Sjafrizal (2008) terhambatnya mobilitas dapat mengakibatkan kelebihan produksi sulit untuk dikirim ke daerah lain yang membutuhkan begitupun sebaliknya dan hal ini juga berlaku untuk tenaga kerja. Kualitas infrastruktur juga menjadi salah satu daya tarik bagi investor, jika infrastruktur buruk maka investor akan enggan untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut. Untuk itu dalam mengatasi masalah ketimpangan yang terjadi maka pemerintah daerah harus segera melakukan perbaikan dari segi infrastruktur karena perbaikan atau baiknya kondisi infrastruktur di suatu wilayah akan dapat mempengaruhi

jumlah investasi disuatu daerah, dan investasi ini akan mengurangi jumlah pengurangan disuatu wilayah.

5. Perbedaan Jumlah Investasi

Investasi baik berupa penanaman modal asing maupun dalam negeri dapat berdampak pada kemampuan suatu wilayah untuk melakukan pembangunan. Investasi ini sangat diperlukan oleh wilayah untuk memperbaiki keadaan wilayahnya seperti memperbaiki infrastruktur, meningkatkan fasilitas publik dan lainnya. Investasi juga dapat menjadi penggerak bagi perekonomian wilayah, oleh karena itu perbedaan jumlah investasi ini juga dapat menyebabkan perbedaan performa ekonomi wilayah.

6. Perbedaan Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) suatu wilayah

Perbedaan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) tentu sangat mempengaruhi performa perekonomian suatu wilayah. PDRB dapat digunakan untuk membiayai pembangunan-pembangunan yang dilakukan wilayah tersebut. Terkait dengan perbedaan pendapatan regional yang dicerminkan oleh nilai PDRB suatu daerah yang ada di Pulau Lombok sebagai berikut :

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Lombok tahun 2019-2020 berdasarkan harga konstan 2010 dalam jutaan Rupiah

No	Kabupaten/ kota	Tahun	
		2019	2020
1	Kota Mataram	13.811,53	13.051,59
2	Kabupaten Lombok Barat	10.894,72	10.123,59
3	Kabupaten Lombok Tengah	12.400,27	11.571,99
4	Kabupaten Lombok Timur	14.424,00	13.977,66
5	Kabupaten Lombok Utara	3.477,84	3.218,91

Sumber : BPS NTB 2021

Dari data pada tabel di atas menggambarkan mengenai nilai total pendapatan produk domestik regional bruto masing-masing Kabupaten/ Kota yang ada di Pulau Lombok dari tahun 2019-2020. Dari data di atas menunjukkan rata-rata Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Lombok mengalami penurunan nilai PDRB pada tahun 2020 hal ini dikarenakan karena pada tahun 2020 tersebut adanya kerisis secara global yang diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19, dalam hal ini hanya daerah Kabupaten Sumbawa Besar yang mengalami kenaikan nilai PDRB pada tahun 2020.

Perbedaan nilai PDRB dari masing-masing daerah yang ada di Pulau Lombok merupakan salah satu penyebab terjadinya ketimpangan, untuk itu untuk meminimalisir angka ketimpangan tersebut masing-masing Kabupaten/ Kota yang ada di Pulau Lombok harus terus menggenjot performa sektor ekonomi yang ada di daerah masing-masing guna meningkatkan pendapatan masing-masing daerah yang ada di Pulau Lombok, dengan tujuan meminimalisir angka ketimpangan yang terjadi.

5. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan masalah ketimpangan yang terjadi antar daerah di Pulau Lombok dengan menggunakan perhitungan indeks wiliamson, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Bahwa setelah dilakukan analisis ketimpangan antar daerah di Pulau Lombok pada tahun 2019-2020 dengan menggunakan perhitungan nilai indeks wiliamson maka didapatkan nilai sebesar 0,56 pada tahun 2019 dan 0,51 pada tahun 2020. Sesuai dengan kategori ketimpangan berdasarkan

indeks wiliamson yakni, 0,01-0,50 adalah kategori ketimpangan rendah, 0,51-0,60 adalah kategori ketimpangan sedang dan > 0,61 adalah kategori ketimpangan tinggi. Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka kategori ketimpangan di Pulau Lombok berada pada posisi ketimpangan sedang. Untuk itu ketimpangan pendapatan regional yang terjadi di Pulau Lombok merupakan kategori ketimpangan sedang, tetapi harus dilakukan penanganan oleh pemerintah guna meminimalisir dampak ketimpangan yang terjadi sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial antar daerah di Provinsi Nusa Tenggara barat

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut Pemerintah daerah khususnya masing-masing Kabupaten/ Kota yang ada di Pulau Lombok harus meminimalisir ketimpangan pendapatan tersebut dengan cara, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, perbaikan infrastruktur serta membuka peluang ninvestasi yang sebesar-besarnya bagi pihak swasta; Pemerintah daerah harus meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dengan cara menambah jumlah fasilitas kesehatan seperti ketersediaan rumah sakit yang memadai, sehingga dengan peningkatan jumlah fasilitas kesehatan tersebut maka taraf kesehatan masyarakat akan mengalami peningkatan; Bagi pihak akademisi yakni, sebagai refrensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan indeks wiliamson, tetapi harus ditambah lingkup wilayahnya serta trenwaktunya ditambah guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat 2021
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia
- Hutabarat. (2014). Analisis Disparitas Pendapatan PerKapita Antar. Kecamatan dan Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan di Kabupaten. Karangasem. *E-Jurnal*. Diakses tanggal 29 Noveber 2021
- Kuncoro. (2006). "*Ekonomi Pembangunan*", Jakarta : Penerbit Salemba. Empat,
- Kuznet, Simon. (1955). *Economic Growth and Inquality The American Economic*. Review. 63.
- Latumaerissa. (2015). E- Jurnal diakses tanggal 29 Noveber 2021
- Lembaga Independen Oxfam Indonesia dan International NGO Forum on. Indonesia *Development (INFID)* pada tahun 2017. Dokumen hasil analisis pembangunan daerah di indonesia 2015
- Irkham, M. (2019). Analisis ketimpangan wilayah provinsi banten. *Akuntabel*, 16(1), 98-110.
- Andiny, P., Adelida, N., & Meutia, R. (2019). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota (Studi Kasus Kabupaten Aceh Timur Dan Kota Langsa). *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 47-56.
- Simon Fuglsang. (2013). e- Jurnal diakses tanggal 29 Noveber 2021
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Baduose Media, Cetakan. Pertama. Padang.
- Soediyono. (1992). *Ekonomi Makro Pengantar Analisis Nasional*. Edisi ke empat. Liberty : Yogyakarta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,. Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukirno. (2010). *Makroekonomi. Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. PT. Raja.
- Todaro. (2006). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta : PT. Salemba.
- Todaro. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi. Kedelapan*. Jakarta : Penerbit Erlangga.